



**RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2021-2026**

Daftar Isi

| | | |
|-----------|---|----|
| BAB I. | PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 | Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 | Landasan Hukum..... | 3 |
| 1.3 | Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 | Sistematika Penulisan..... | 5 |
| BAB II. | GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 7 |
| 2.1 | Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi..... | 7 |
| 2.2 | Sumber Daya Perangkat Daerah | 8 |
| 2.2.1 | Sumber Daya Manusia | 9 |
| 2.2.2 | Sarana dan Prasarana | 12 |
| 2.3 | Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 13 |
| 2.3.1 | Capaian Kinerja Pelayanan | 13 |
| 2.3.2 | Pencapaian Kinerja Anggaran | 15 |
| 2.4 | Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah | 18 |
| BAB III. | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH | 21 |
| 3.1 | Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah..... | 21 |
| 3.2 | Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 25 |
| 3.3 | Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga..... | 29 |
| 3.4 | Penentuan Isu-isu Strategis | 31 |
| BAB IV. | TUJUAN DAN SASARAN | 33 |
| BAB V. | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 37 |
| BAB VI. | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 39 |
| BAB VII. | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | 52 |
| BAB VIII. | PENUTUP | 55 |
| 8.1 | Kesimpulan | 55 |
| 8.2 | Kaidah Pelaksanaan..... | 56 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel II-1 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin | 9 |
| Tabel II-2 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan | 9 |
| Tabel II-3 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Eselon | 10 |
| Tabel II-4 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan | 10 |
| Tabel II-5 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur | 11 |
| Tabel II-6 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Jabatan | 12 |
| Tabel II-7 Daftar Asset yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten | 12 |
| Tabel II-8 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Bengkalis | 14 |
| Tabel II-9 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 | 15 |
| Tabel II-10 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020 | 16 |
| Tabel II-11 Pencapaian Kinerja Anggaran BPKAD Kabupaten Bengkalis | 17 |
| Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis | 23 |
| Tabel III-2 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas | 24 |
| Tabel III-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 28 |
| Tabel III-4 Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis | 30 |
| Tabel III-5 Perumusan Isu Strategis Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah | 31 |
| Tabel IV- 1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis | 41 |
| Tabel V-1 Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Sesuai Dengan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah BPKAD | 38 |
| Tabel VI-1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 | 41 |
| Tabel VI-2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program | 46 |
| Tabel VI-3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan permendagri no. 90 tahun 2019 | 47 |
| Tabel VII-1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 | 53 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar II-1 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis | 8 |
| Gambar III-1 Kerangka Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis | 22 |
| Gambar IV-1 Anallisa Pohon Masalah | 34 |
| Gambar IV-2 Analisa Pohon Tujuan | 34 |
| Gambar IV-3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator) | 35 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Bengkalis memiliki komitmen terus-menerus melakukan perubahan paradigma pengelolaan keuangan daerah. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan tuntutan yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pemerintahan. Hal ini penting karena pengelolaan keuangan dan aset merupakan salah satu komponen penting pembangunan daerah sekaligus sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan otonomi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang dengan sebaik-baiknya maka perlu disusun dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun tahunan, yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra dan Renja) ini merupakan hasil *breakdown* dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk: (1) Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua *stakeholders* pembangunan; dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan Organisasi Perangkat Daerah secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

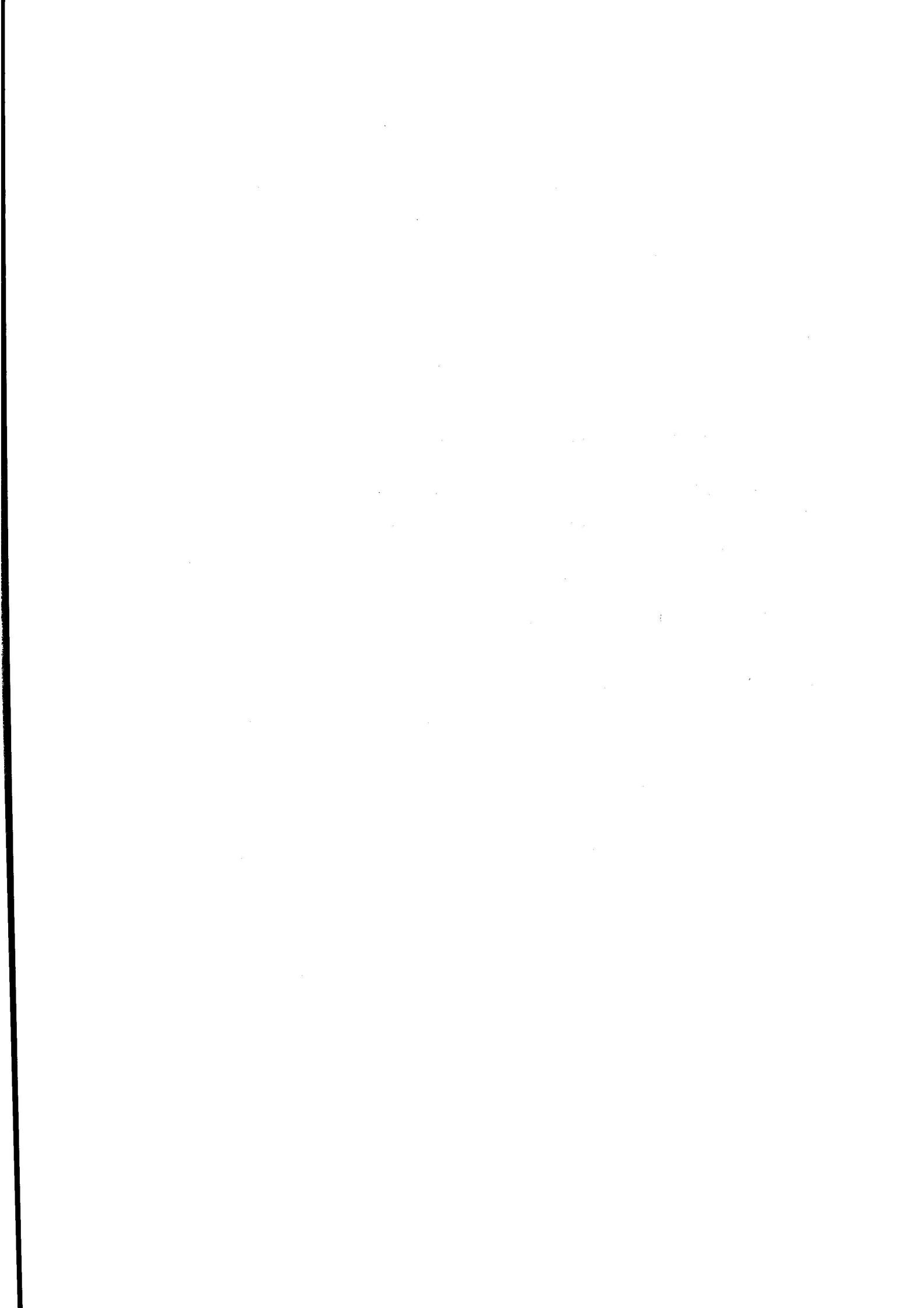
Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada atau yang mungkin muncul. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang

realistis guna mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra memiliki fungsi sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban perangkat daerah.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam hal penyusunan, penganggaran dan pengelolaan asset daerah Kabupaten Bengkalis.

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis adalah: (1) pendekatan teknokratik yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan; dan (2) pendekatan partisipatif yaitu, melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain melalui forum perangkat daerah. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Adapun tahapan dalam penyusunan Renstra-PD meliputi: (1) persiapan penyusunan, (2) penyusunan rancangan awal, (3) penyusunan rancangan, (4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, (5) penyusunan rancangan akhir, dan (6) penetapan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra. Dalam penyusunan RPJMD terdapat uraian tentang keuangan



dan aset daerah dalam lima tahun kedepan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis karena melalui proyeksi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis tersebut tertuang tantangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis dalam menertibkan pengelolaan aset daerah. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja) BPKAD karena Renstra merupakan pedoman dalam perumusan Renja tahunan perangkat daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten Bengkulu sesuai tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu dalam kurun waktu Tahun 2021-2026. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 adalah :

- A. Sebagai pedoman bagi pimpinan perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu beserta jajarannya dalam melaksanakan peranan strategis sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Sebagai dasar penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu selama kurun waktu Tahun 2021-2026.
- C. Sebagai media akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam rangka menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan

peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

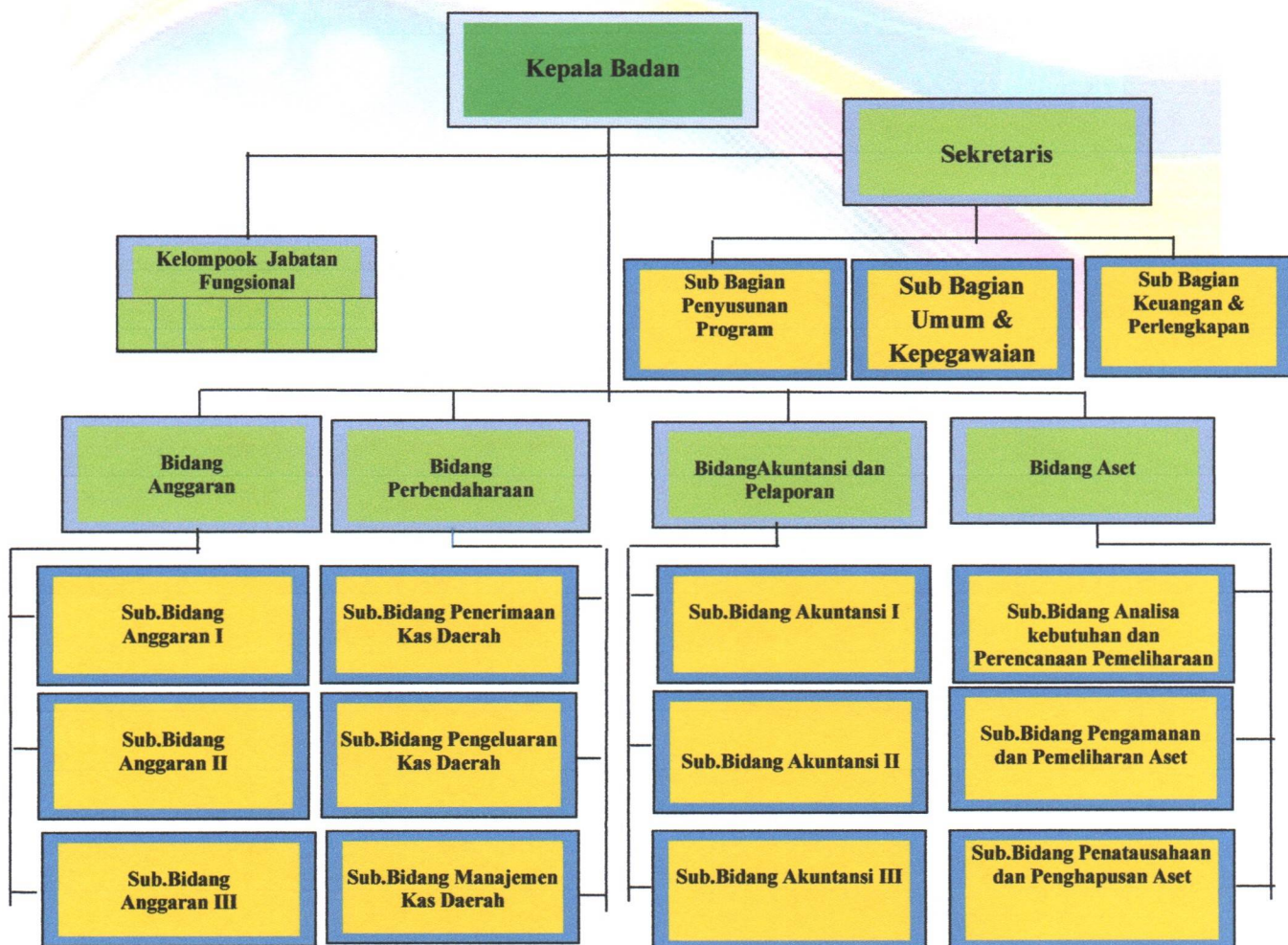
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas sebagai Penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, mempunyai fungsi :

1. penyelenggaraan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan daerah dan aset.
2. pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah, dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah;
4. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

**Gambar II-1 Struktur Organisasi
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis**



Sumber : Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis 69 PNS, Tenaga Kontrak sebanyak 94 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel II-1 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Jenis Kelamin

| No. | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------------|--------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| | | P | L | |
| 1 | Sekretariat | 8 | 13 | 21 |
| 2 | Bidang Anggaran | 6 | 4 | 10 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | 11 | 4 | 15 |
| 4 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 9 | 2 | 11 |
| 5 | Bidang Aset | 7 | 5 | 12 |
| TOTAL | | 41 | 28 | 69 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 69 orang PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, 41 orang (59,42%) adalah perempuan dan 22 orang (31,88%) adalah laki-laki.

Tabel II-2 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Golongan

| No. | Unit Wilayah | Golongan | | | | Jumlah |
|--------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| | | I | II | III | IV | |
| 1 | Sekretariat | 1 | 6 | 12 | 2 | 21 |
| 2 | Bidang Anggaran | | 2 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | | 4 | 11 | | 15 |
| 4 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | | 3 | 7 | 1 | 11 |
| 5 | Bidang Aset | | 3 | 9 | | 12 |
| TOTAL | | 1 | 18 | 46 | 4 | 69 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Sebagian besar adalah Golongan II dan III, yaitu mencapai 64 orang atau 92,75%, sedangkan Golongan I dan IV hanya sejumlah 5 orang atau 7,24%. Kondisi ini mengakibatkan adanya pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Golongan II tetapi dilaksanakan oleh pegawai Golongan III, bahkan tidak menutup kemungkinan dari Golongan IV.

Tabel II-3 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkulu Menurut Eselon

| No. | Unit Kerja | ESELON | | |
|--------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| | | II | III | IV |
| 1 | Sekretariat | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Bidang Anggaran | | 1 | 3 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | | 1 | 3 |
| 4 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | | 1 | 3 |
| 5 | Bidang Aset | | 1 | 3 |
| TOTAL | | 1 | 5 | 15 |

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat 21 jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu.

Tabel II-4 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkulu Menurut Pendidikan Formal yang Ditamatkan

| No. | Unit Wilayah | Tingkat Pendidikan | | | | | Jumlah |
|--------------|--------------------------------|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | | SMP | SMA | DIPLOMA | S1 | S2 | |
| 1 | Sekretariat | 1 | 8 | 2 | 7 | 3 | 21 |
| 2 | Bidang Anggaran | - | 2 | - | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | - | 4 | 2 | 9 | - | 15 |
| 4 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | - | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 |
| 5 | Bidang Aset | - | 5 | - | 7 | - | 12 |
| TOTAL | | 1 | 22 | 5 | 36 | 5 | 69 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis didominasi dengan tingkat pendidikan S1-S2 yaitu sejumlah 41 orang atau sebesar 59,42% dan tingkat pendidikan SMP-DIPLOMA Berjumlah 28 Orang atau sebesar 40,57%. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkungan lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-5 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Kelompok Umur

| No | Unit kerja | Usia Tahun | | | | | | | Jumlah |
|--------------|--------------------------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 20-25 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | >50 | |
| 1 | Sekretariat | - | - | - | 3 | 5 | 7 | 6 | 21 |
| 2 | Bidang Anggaran | - | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | - | - | - | 3 | 9 | 2 | 1 | 15 |
| 4 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | - | - | - | 3 | 7 | 1 | - | 11 |
| 5 | Bidang Aset | - | - | - | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| TOTAL | | - | - | - | 12 | 31 | 13 | 13 | 69 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berusia 41-45 dengan jumlah 31 Orang, usia 36-40 berjumlah 12 orang, usia 46-50 berjumlah 13 orang, usia > 50 juga berjumlah 13 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis paling banyak berusia 41-45.

Tabel II-6 Komposisi PNS BPKAD Kabupaten Bengkalis Menurut Jabatan

| No. | Jabatan | Jumlah |
|-------|--------------------------------|--------|
| 1 | Sekretariat | 5 |
| 2 | Bidang Anggaran | 4 |
| 3 | Bidang Perbendaharaan | 4 |
| 4 | Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 4 |
| 5 | Bidang Aset | 4 |
| TOTAL | | 21 |

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 21 jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini menunjukkan tidak ada jabatan yang kosong di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Tabel II-7 Daftar asset yang dimiliki oleh BPKAD Kabupaten Bengkalis

| No. | Unit Wilayah | Golongan | | | Jumlah |
|-----|------------------------------|----------|--------|-------------|--------|
| | | Baik | Sedang | Rusak Berat | |
| 1 | Kendaraan Dinas | 53 | | | 53 |
| 2 | Alat Elektronik Kantor/Mesin | 372 | | | 372 |
| 3 | Meubeler | 184 | | | 184 |
| 4 | Alat Elektronik Lainnya | 32 | | | 32 |
| 5 | Alat-Alat Kantor Lainnya. | 39 | | | 39 |
| | jumlah | 680 | | | 680 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa keseluruhan Aset yang berada di Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berjumlah 680 aset. Adapun aset yang paling banyak adalah Alat Elektronik Kantor/Mesin sebanyak 372 unit.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefenisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1 Capaian Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus menerus melakukan peningkatan pelayanan serta kenyamanan dan kemudahan kepada OPD terkait dalam pengembangan pelayanan. Tujuannya adalah agar segala urusan penatausahaan keuangan dan penatausahaan aset lebih baik lagi.

Terkait dengan keberhasilan pencapaian target-target Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 di sajikan pada tabel berikut:

Tabel II-8 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKAD Kabupaten Bengkulu

| No. | Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsinya | Target | | | | Realisasi | | | | Rasio Capaian Tahun Ke- % | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|---------------------------|---------|---------|---------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Lamanya waktu penyusunan RAPBD | 210 Hari | 180 Hari | 180 Hari | 180 Hari | 180 Hari | 180 Hari | 180 Hari | 180 Hari | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 111,11% | 105,26% | 100% | 100% |
| 2 | Rata-rata waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu | 3 Hari | 2.5 Hari | 2 Hari | 1 Hari | 2,5 Hari | 2 Hari | 2 Hari | 1 Hari | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 76% | 77% | 78% | 79% | 77% | 78% | 78% | 78% | 100% | 100% | 100% | 98,73% |
| 3 | Persentase Peningkatan Penyelesaian Laporan Keuangan Daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Persentase aset yang tercatat dalam system secara update | 72% | 74% | 76% | 78% | 87% | 89% | 89% | 100% | 117,56% | 117,10% | 128,20% | 128,20% |
| | Persentase aset yang digunakan (berfungsi) sesuai peruntukannya | 62% | 64% | 66% | 68% | 64% | 66% | 66% | 95% | 100% | 100% | 139,70% | 139,70% |
| 5 | Predikat Evaluasi SAKIP BPKAD | 50% | 60% | 70% | 80% | 60,14% | 60,14% | 60,14% | 60,14% | 125,06% | 100,23% | 85,91% | 75,17 |
| | Presentase Temuan Inspektorat / BPK yang Ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.3.2 Pencapaian Kinerja Anggaran

Di samping kinerja pencapaian target pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya, juga perlu diukur pencapaian kinerja anggaran. Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.

a) Belanja Tidak Langsung (BTL)

Realisasi Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai baik pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai) Tahun Anggaran 2017-2020 adalah sejumlah Rp. 99.043.818.986 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Empat Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah) atau sebesar 94,35% dari dana yang tersedia dalam DPA yaitu sejumlah Rp. 104.969.414.653,56 (Seratus Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Koma, Lima Puluh Enam Rupiah). Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel II-9 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020**

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|-------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2017 | 20.008.963.809,00 | 19.558.749.943 | 97,74% |
| 2 | 2018 | 22.809.068.060,00 | 21.280.212.220 | 93,29% |
| 3 | 2019 | 27.073.481.603,00 | 23.407.592.216 | 86,45% |
| 4 | 2020 | 35.077.901.181,65 | 34.797.264.607 | 99,19% |
| Jumlah | | 104.969.414.653,65 | 99.043.818.986 | 94,35% |

Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa penyerapan dana anggaran Belanja Tidak Langsung sudah cukup optimal dengan predikat “tinggi”. Namun demikian perlu dioptimalkan lagi anggaran yang tidak digunakan mencapai Rp. 5.925.595.667,65 (Lima Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Koma Enam Puluh Lima Rupiah).

b) Belanja Langsung (BL)

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2017-2020 yang tersedia di DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sejumlah Rp. 199.857.526.675 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan realisasinya sejumlah Rp. 183.389.543.681 (Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu) atau sebesar 91,76%. Rincian anggaran dan realisasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel II-10 Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020**

| No | Tahun | Anggaran | Realisasi | % |
|---------------|-------|------------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 2017 | 49.040.398.075 | 44.113.426.193 | 89,95% |
| 2 | 2018 | 46.850.592.590 | 42.029.452.085 | 89,70% |
| 3 | 2019 | 61.616.129.390 | 58.016.360.214 | 94,15% |
| 4 | 2020 | 42.350.406.620 | 39.230.165.189 | 92,63% |
| Jumlah | | 199.857.526.675 | 183.389.543.681 | 91,76% |

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis sudah cukup baik dengan predikat "tinggi". Namun demikian perlu dioptimalkan lagi mengingat anggaran yang tidak terealisasi mencapai Rp. 16.467.982.994 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah).

Berikut ini disajikan tabel rincian target dan realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017-2020.

Tabel II-11 Pencapaian Kinerja Anggaran BPKAD Kabupaten Bengkulu

| N o. | Uraian | Anggaran Tahun | | | | | Realisasi Anggaran Tahun | | | | | Rasio Antara Realisasi Anggaran | | | | | Rata - Rata Pertumbuhan | | |
|---------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------------------------------|--------|------|------|------|-------------------------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | Tahun ke | | | | | | | |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran | Realisasi |
| I | Belanja Tidak Langsung | 20.008.963.809 | 22.809.068.060 | 27.073.481.603 | 35.077.901.181.65 | 19.558.748.943 | 21.280.212.220 | 23.407.592.216 | 34.797.264.697 | 97,74% | 93,29% | 86,45% | 99,19% | | | | | | |
| II | Belanja Langsung | 49.040.398.075 | 46.850.592.590 | 61.616.129.390 | 42.350.406.620 | 44.113.426.193 | 42.029.452.085 | 58.016.360.214 | 39.230.165.189 | 89,95% | 89,70% | 94,15% | 92,63% | | | | | | |
| 1 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 3.986.541.145 | 4.872.422.630 | 6.183.958.940 | 7.932.730.440 | 3.770.614.120 | 4.161.461.724 | 5.158.480.671 | 7.426.603.847 | 94,58% | 85,40% | 83,41% | 93,61% | | | | | | |
| 2 | Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur | 22.411.506.000 | 14.333.828.000 | 20.467.554.150 | 5.058.658.300 | 17.124.334.713 | 12.722.426.929 | 19.637.549.064 | 3.762.719.964 | 76,40% | 88,75% | 95,94% | 74,38% | | | | | | |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.459.554.700 | 140.000.000 | 770.000.000 | 325.000.000 | 723.809.500 | 136.900.000 | 739.425.500 | 315.175.473 | 49,59% | 97,78% | 96,02% | 96,97% | | | | | | |
| 4 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan | 264.677.150 | 975.698.500 | 1.990.141.700 | 1.348.184.800 | 114.124.936 | 838.756.700 | 1.886.211.579 | 1.307.501.901 | 43,11% | 85,96% | 94,77% | 96,98% | | | | | | |
| 5 | Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | 20.918.119.080 | 26.528.643.460 | 32.204.474.600 | 27.685.833.080 | 22.380.542.924 | 24.170.046.732 | 30.594.693.400 | 26.418.164.004 | 93,46% | 91,10% | 95,00% | 95,42% | | | | | | |

Dari tabel Di atas dapat dilihat bahwa anggaran pada program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah bertambah setiap tahunnya hal ini terjadi karena adanya kebutuhan anggaran untuk mencapai kinerja program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dimasa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, khususnya terhadap indicator sasaran, outcome program, maupun output kegiatan serta berupaya memperbaiki kembali metode penyusunan perencanaan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah dimasa depan. Oleh karena itu perlu dilakukan identifikasi terhadap semua kondisi yang ada, yang berpotensi menjadi tantangan maupun peluang pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi.

Adapun faktor internal kekuatan (strengths) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas

Sudah adanya Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah Aset Daerah Kabupaten Bengkalis

2. Disiplin dan tanggung jawab sudah baik

Hamper seluruh Seluruh Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis baik ASN maupun ASN memiliki rasa tanggungjawab terhadap pekerjaannya.

3. Adanya SOP untuk mendukung operasional organisasi untuk kelancaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis juga memiliki beberapa kelemahan (weakness) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kuantitas dan Kualitas SDM masih belum memadai;

Kuantitas dan kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan menambah PNS dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan asset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal.

2. Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Sistem Aplikasi SIPD dan SIMDA BMD masih belum terintegrasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian .

3. Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah;

4. Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati Bengkalis yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah

1. Jumlah ruang kerja yang belum memadai.

Adapun peluang yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan perangkat daerah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;

Pengelolaan Keuangan dan asset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya.

2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan asset daerah;

Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.

3. Penguatan teknologi informasi yang memadai dan modern;

Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran dan modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data –data transaksi pengelolaan keuangan dan asset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna.

Adapun tantangan yang dapat dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengembangkan pelayanan adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinasi antar dinas terkait belum memadai; Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indicator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya
- 2) Belum optimalnya integrasi antara system informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; Kondisi tersebut menjadi kendala dalam menyusun laporan keuangan.
- 3) Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya.
- 4) Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah; Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.
- 5) Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi. Hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang baru.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkungan eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis terhadap tugas dan fungsi serta kinerja dimasa lalu, dapat dirumuskan permasalahan utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah " ***Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten Bengkalis*** ", yang tergambar dari data yang menunjukkan bahwa

Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah. Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa permasalahan antara lain:

1. Belum optimalnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu.
2. Belum tepat waktunya penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
3. Masih belum terintegrasikannya system informasi akuntansi dengan aset
4. Belum optimalnya penatausahaan aset daerah Kabupaten Bengkulu.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Dearah lebih kepada permasalahan eksternal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar III-1 Kerangka Permasalahan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu**



Berdasarkan Permasalahan dan isu strategi tersebut maka perlu di lakukan strategi dan arah kebijakan. Adapun strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III-1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|--|--|---|
| 1. | Belum Optimalnya Kualitas Penganggaran Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Dalam Proses Penganggaran APBD | Masih rendahnya pemahaman terhadap peraturan penyusunan APBD | Kurangnya sosialisasi komunikasi dan interanalisasi dan designisasi Belum ada kesepakatan pemberian sanksi kedua pihak antara pemerintah dan DPRD dalam proses penganggaran sesuai siklus yang ditetapkan kemendagri |
| 2. | Belum Tepat Waktu Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran | Belum tepat waktunya penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. | Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah Keterlambatan penyiapan pertanggungjawaban keuangan pelaksana kegiatan oleh perangkat daerah |
| 3. | Penyampaian Pelaporan Keuangan | Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset | Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; |
| | | Masih rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan masing-masing OPD; | Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan asset. |
| 4. | Belum Optimalnya Penatausahaan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis | | Status aset masih ada yang belum jelas dan |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | Masih rendahnya kualitas pengelolaan Aset daerah | memiliki ketetapan hukum |
| | | | Masih banyaknya asset yang belum dihapus |
| | | Belum Optimalnya Managemen Aset Daerah Kabupaten Bengkalis | Kurangnya Pemahaman Tentang Pemanfaatan Aset yang Bisa Menghasilkan PAD |

Tabael III-2 Identifikasi Permasalahan Untuk Penentuan Program Prioritas

| No. | Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah | Interpensi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>) | Permasalahan | Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan |
|---------|---|--|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan | Belum Tercapai | | |
| 5.02 | Keuangan | | Belum optimalnya kualitas penganggaran dan penataan asset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis | adanya komitmen dan dukungan pimpinan dan jajaran staf Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kualitas penganggaran dan meningkatkan penatausahaan asset daerah. |
| 5.02.02 | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| 5.02.03 | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | |

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera”***.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar sasaran pembangunan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Misi RPJMD Kabupaten Bengkalis 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya ALam dan Sumber daya manusia yang efektif dalam memajukan perekonomian;
2. Mewujudkan reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya melayu menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter.
3. Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan mengembangkan potensi wilayah perbatasan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari rumusan visi dan misi tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah , yaitu:

- a) Diperlukannya pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien secara bersesuaian dengan tuntutan perubahan terutama dalam hal kemajuan teknologi dan informasi.
- b) Salah satu pokok visi dalam RPJMD adalah Kabupaten Bengkalis yang bermartuah, maju dan sejahtera. Bila pengelolaan aset dan kekayaan daerah dapat dilakukan secara baik, efektif dan efisien untuk mendukung visi Bupati Bengkalis.
- c) Adanya komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani merupakan suplemen pendorong/tambahan semangat/momentum bagi BPKAD untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kewenangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

Adapun faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendorong

- Telah dilakukan Asistensi/pendampingan penyusunan APBD
- Komitmen antara Kepala Daerah dan DPRD untuk menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD
- Telah dilakukan verifikasi terhadap rancangan PPAS sehingga dapat segera menindaklanjuti hasil catatan verifikasi dan PPAS yang ditetapkan sudah selaras dengan RKPD.
- Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul pelaksanaan/penatausahaan untuk mempercepat proses penerbitan SP2D dan sudah online untuk seluruh SKPD di Kab. Bengkalis.
- Telah dibangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) modul Pertanggungjawaban secara akrual untuk mempercepat proses penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Faktor penghambat

- Adanya kesalahan sistem dalam membaca data/error yang mengakibatkan ketidak sinkronan program dan kegiatan di dokumen Musrenbang, dokumen RKPD maupun PPAS.

- Dokumen Dikembalikan ke SKPD karena terdapat kesalahan sehingga tidak dapat diproses.
- Penyampaian dokumen SPM melebihi batas waktu yang sudah ditetapkan (3 Hari)
- Belum Mendapatkan Nilai penyusutan Aset
- Adanya Perubahan Akun terhadap aset mengikuti permendagri No. 108 Tahun 2019 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Adanya data aset yang belum tercatat dalam sistem karena adanya penghapusan dan pengabungan SKPD.
- Kurangnya dokumen pendukung

Salah satu komponen dari perencanaan strategis adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang mengacu pada pernyataan visi dan misi. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan selama periode perencanaan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan. Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Bupati Bengkalis yang terkait dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III-3 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

| Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------|---|---|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan | Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | Persentase Petumbuhan PAD | Pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien | Melaksanakan peningkatan kualitas pengelolan aset dan kekayaan daerah tepat guna. |

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis memiliki tujuan meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan melakukan penguatan tata Kelola asset dan kekayaan daerah yang baik, efektif dan efisien serta melaksanakan peningkatan kualitas pengelolaan asset dan kekayaan daerah yang tepat guna untuk mencapai tujuan.

3.3 Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain berfungsi sebagai guidance dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan Kementerian Keuangan, dokumen ini juga menunjukkan peran Kementerian Keuangan dalam menopang upaya pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden pada periode pemerintahan tahun 2020-2024. Secara umum, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Keuangan juga mempertimbangkan berbagai kondisi yang dapat memengaruhi perekonomian Indonesia, sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Kementerian Keuangan diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang perekonomian.

Salah satu kondisi yang menjadi perhatian Kementerian Keuangan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 adalah merebaknya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia pada awal tahun 2020 yang berimbas pada perlambatan pertumbuhan ekonomi global termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 yang meluas di berbagai negara memiliki dampak keekonomian yang perlu diantisipasi dan direspons oleh seluruh negara termasuk Indonesia. Salah satu bentuk respons Pemerintah dalam menangani permasalahan ini adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini secara umum mengatur dua hal, yaitu kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan.

Dalam Renstra dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah “Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Kabupaten/Kota”

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis adalah “Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif”. Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah dan Optimalisasi Penataan Aset”

Tabel III-4 Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis

| No | Indikator Kinerja | Sasaran Renstra BPKAD Kabupaten Bengkalis | Sasaran Renstra BKAD Provinsi RIAU | Sasaran pada Renstra Kementerian Keuangan |
|----------|--|---|---|---|
| (1) 1 | (2) Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | (3) Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | (4) Meningkatnya Kualitas tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. | (5) Meningkatnya Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas |

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dikedepankan menjadi prioritas penanganan karena memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra, dan mempunyai dampak yang luas terhadap daerah dan masyarakat. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan pertimbangan dari gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis, visi-misi dan program Bupati Bengkalis dan Wakil Bupati Bengkalis, sasaran jangka menengah pada Renstra Kabupaten Bengkalis, Renstra KLHK, Renstra DLHK Provinsi Riau. Berdasarkan telaahan permasalahan yang telah diidentifikasi, dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di bidang Keuangan dan Aset. Identifikasi terhadap isu-isu strategis yang muncul selanjutnya dijadikan dasar dalam menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis ini yaitu dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III-5 Perumusan Isu Strategis Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu

| No. | Aspek Permasalahan Pelayanan PD | Permasalahan Strategis | Telaahan Renstra | Telaahan Visi, Misi, dan Program KD dan Wakil KD Terpilih | Telaahan RTRW/KLHS | Isu-isu Strategis |
|-----|---|---|---|--|--------------------|--|
| 1 | Permasalahan dalam bidang anggaran | Belum optimalnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu; | Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah harus mendapatkan opini WTP | Visi : Terwujudnya Kabupaten Bengkulu yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Misi 1 Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif Dalam Memajukan Perekonomian Program Kerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas | - | Belum optimalnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu |
| 2 | Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan | Belum tepat waktunya penyampaian pertanggungjawaban bendahara pengeluaran. | | | | |
| 3 | Permasalahan dalam Bidang Akuntansi dan Pelaporan | Penyampaian pelaporan keuangan | | | | |
| 4 | Permasalahan dalam Bidang Aset | Belum Optimal Penatausahaan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu | | | | |

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam lima tahun ke depan akan menjalankan segenap penyelenggaraan urusan pendapatan daerah dengan tujuan yaitu ***“Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif”***

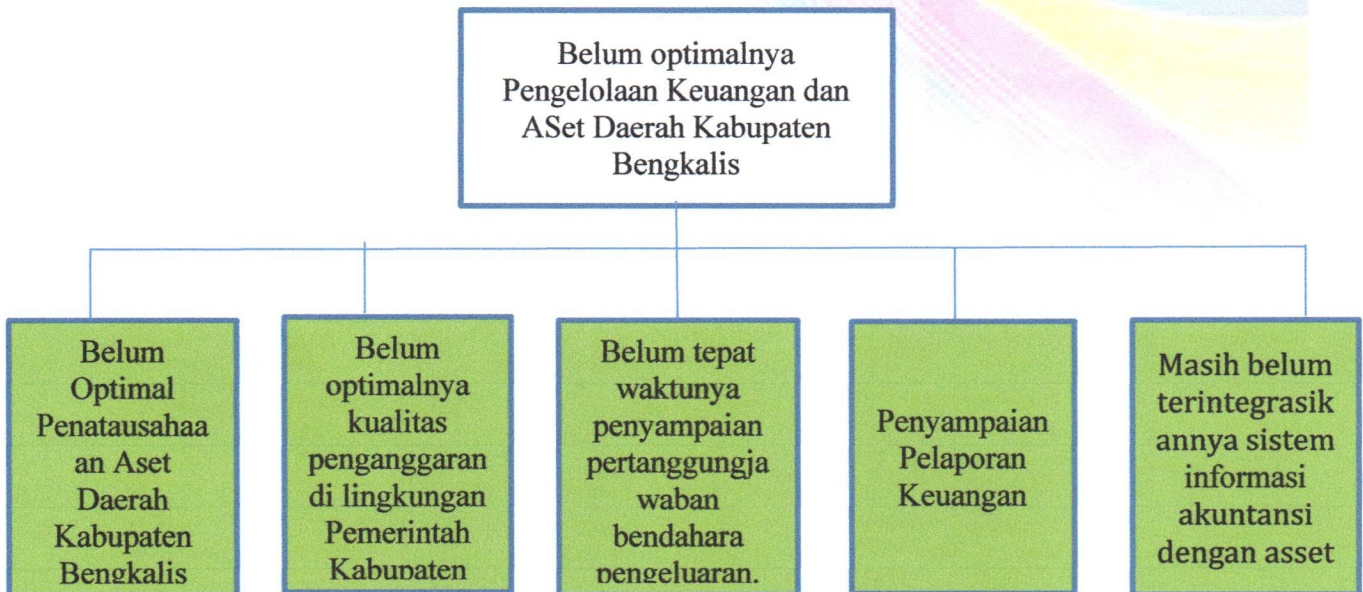
Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, dirumuskan sasaran sebagai wujud penyelenggaraan urusan, yakni ***“Terwujudnya Peningkatan Kemandirian Daerah dan Optimalisasi Penataan Aset”***

1. Meningkatnya Penatausahaan asset Daerah Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase Penatausahaan asset yang tertib dan terukur
 - ✓ Persentase pemanfaatan kekayaan aset daerah yang menunjang peningkatan PAD
2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Ketepatan waktu Penyusunan APBD
3. Terwujudnya Penyampaian Pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran dan bendahra pembantu yang tepat waktu, dengan indikator sasaran adalah:
 - ✓ Persentase bendahara pengeluaran dan pembantu yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban.

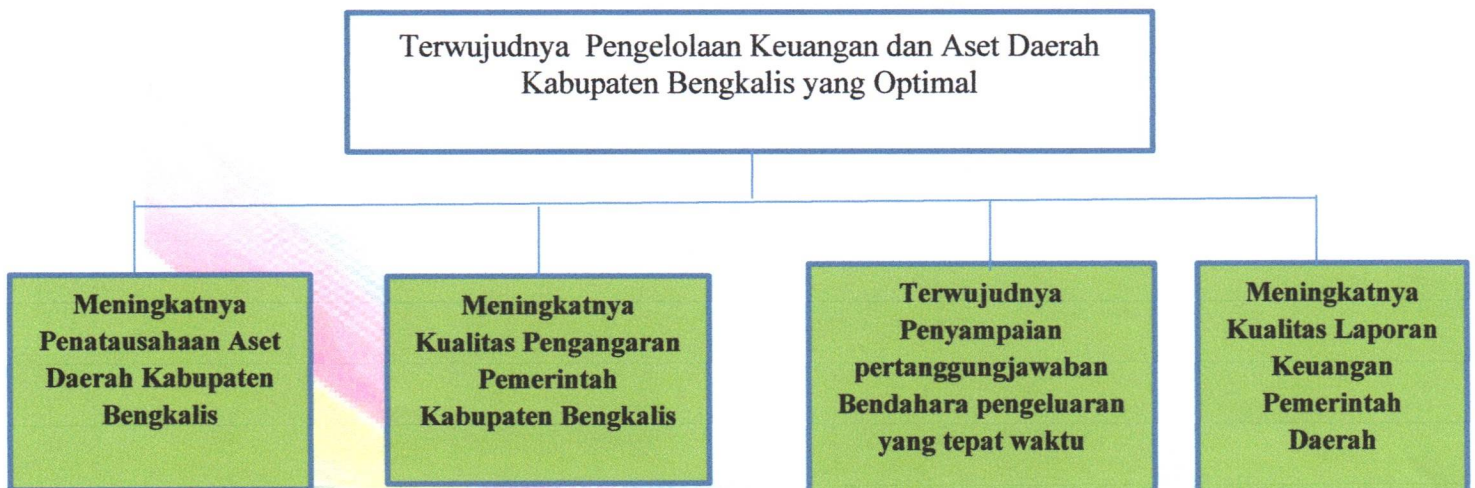
4. Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan daerah, dengan indikator sasaran adalah:

- ✓ Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Gambar IV-1
ANALISA POHON MASALAH

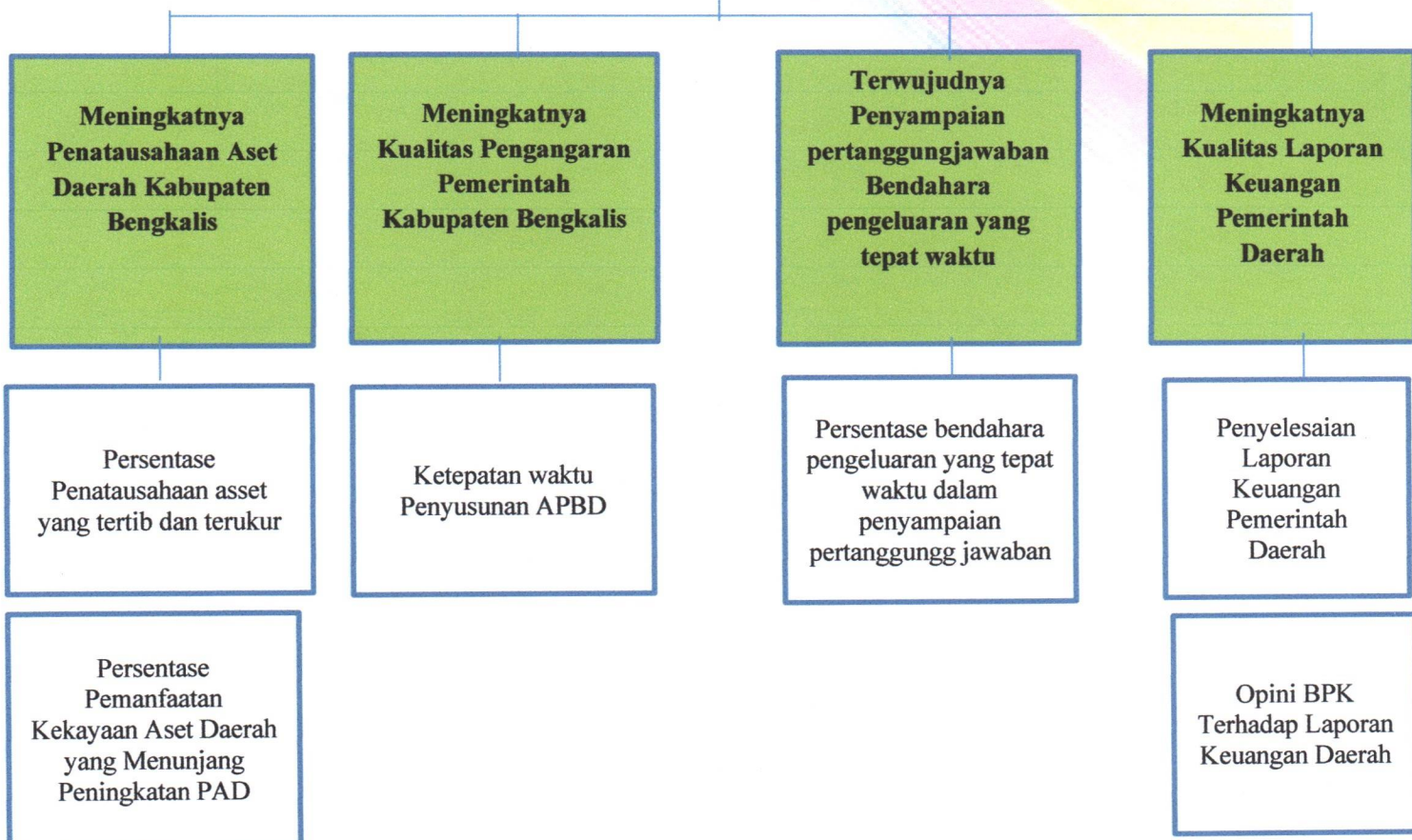


Gambar IV-2
Analisa Pohon Tujuan



Gambar IV-3
Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan ASet Daerah Kabupaten Bengkulu yang Optimal



Tabel IV-1
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA JANGKA MENENGAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

| Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Kondisi awal | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|--|--|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| Mewujudkan Optimalisasi tata Kelola Keuangan dan ASet Daerah yang Transparan serta Akuntabel | Terwujudnya Optimalisasi Penataan Aset Daerah | Persentase Penatausahaan Aset yang Tertib dan Terukur | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| | | Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 75% | 75% |
| | Meningkatnya Kualitas Penganggaran Pemerintah Kabupaten Bengkalis | Ketepatan waktu Penyusunan APBD | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| | Terwujudnya Penyampaian Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran Yang Tepat Waktu | Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% |
| | Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | Meningkatnya Manajemen yang Akuntabel dan Berkinerja Baik | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 70 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 |

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut.

Tabel V-1 Perumusan Strategi Dan Arah Kebijakan Sesuai Dengan Tujuan, Sasaran Jangka Menengah BPKAD

| Misi 1: Mewujudkan Pengelolaan Potensi Keuangan Daerah, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian | | | | | |
|---|-------------------------------------|--|----------------------------|---|---|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif | Rasio PAD terhadap Total Pendapatan | Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | Persentase Pertumbuhan PAD | Pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien | Pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perumusan strategi dan arah kebijakan yang tertera didalam RPJMD Kabupaten Bengkalis dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mendukung Misi Pertama Bupati Bengkalis dengan tujuan meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan asset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan sasaran terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan asset dengan melakukan penguatan tata Kelola asset dan kekayaan daerah yang baik efektif dan efisien, dengan arah kebijakan peningkatan kualitas pengelolaan asset dan kekayaan daerah yang tepat guna.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program Kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Program Program ini adalah program rutin untuk menunjang kegiatan operasional kantor agar proses administrasi pemerintahan yang menjadi urusan organisasi dapan berjalan dengan baik dan lancar guna mencapai kinerja yang telah ditentukan
 1. Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk membiayai proses perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan aset daerah Baik Berupa Renstra, Renja, RKA, DPA beserta Laporan capaian kinerja dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
 2. Administrasi Keuangan Dan Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
 3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik daerah secara berkesinambungan dan tepat guna
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. PRORAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 1. Pengelolaan Barang Milik Daerah
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 3. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 4. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel VI-1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Tahun 2021-2026

| No | Tujuan | Sumber | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Daftar Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan | | | | | | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan | | | | | | Kendali Akhir | Unit Penanggungjawab | Lokus Kegiatan |
|----|---|--------|-----------------|---|--|--|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|---|-------------|----------------|-------------|----------------|-------|---------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 | Tercapainya Meningkatnya Trans - Akutifitas dan Inovasi dan Backcheck Bpk | | 5 02 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | 100% | 35.304.689,559 | 100% | 35.686.342,883 | 100% | 36.190.238,881 | 100% | 36.653.362,536 | 100% | 37.122.995,940 | 100% | 33.305.742,486 | BPKAD | Bengkalis | | |
| | | | 5 02 01 2.01 | KELOMPOK KERJA PENGANGKARAN DAN PERANGKAT DAERAH | 6 Dokumen | 1.022.926,455 | 6 Dokumen | 1.022.926,455 | 6 Dokumen | 1.022.926,455 | 6 Dokumen | 1.022.926,455 | 6 Dokumen | 1.022.926,455 | 6 Dokumen | 1.022.926,455 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 1 | | | 5 02 01 2.01 01 | Kelembagaan dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah | 3 Dokumen | 395.797,900 | 3 Dokumen | 395.797,900 | 3 Dokumen | 395.797,900 | 3 Dokumen | 395.797,900 | 3 Dokumen | 395.797,900 | 3 Dokumen | 395.797,900 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 2 | | | 5 02 01 2.01 02 | Koordinasi dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 206.238,907 | 1 Dokumen | 206.238,907 | 1 Dokumen | 206.238,907 | 1 Dokumen | 206.238,907 | 1 Dokumen | 206.238,907 | 1 Dokumen | 206.238,907 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 3 | | | 5 02 01 2.01 03 | Koordinasi dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 102.273,874 | 1 Dokumen | 102.273,874 | 1 Dokumen | 102.273,874 | 1 Dokumen | 102.273,874 | 1 Dokumen | 102.273,874 | 1 Dokumen | 102.273,874 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 4 | | | 5 02 01 2.01 06 | Laporan Capaian Kinerja yang Relevan | 1 Dokumen | 141.577,566 | 1 Dokumen | 141.577,566 | 1 Dokumen | 141.577,566 | 1 Dokumen | 141.577,566 | 1 Dokumen | 141.577,566 | 1 Dokumen | 141.577,566 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 5 | | | 5 02 01 2.01 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 177.038,208 | 1 Dokumen | 177.038,208 | 1 Dokumen | 177.038,208 | 1 Dokumen | 177.038,208 | 1 Dokumen | 177.038,208 | 1 Dokumen | 177.038,208 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 2 | | | 5 02 01 2.02 | Administrasi Keuangan Daerah | 100% | 13.796.597,048 | 100% | 13.796.597,048 | 100% | 13.796.597,048 | 100% | 13.796.597,048 | 100% | 13.796.597,048 | 100% | 13.796.597,048 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 1 | | | 5 02 01 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan | 100% | 12.999.602,298 | 100% | 12.999.602,298 | 100% | 12.999.602,298 | 100% | 12.999.602,298 | 100% | 12.999.602,298 | 100% | 12.999.602,298 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 2 | | | 5 02 01 2.02 03 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 100% | 202.200,300 | 100% | 202.200,300 | 100% | 202.200,300 | 100% | 202.200,300 | 100% | 202.200,300 | 100% | 202.200,300 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 3 | | | 5 02 01 2.02 05 | Koordinasi dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah | 1 Laporan | 145.234,550 | 1 Laporan | 145.234,550 | 1 Laporan | 145.234,550 | 1 Laporan | 145.234,550 | 1 Laporan | 145.234,550 | 1 Laporan | 145.234,550 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 4 | | | 5 02 01 2.02 06 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 100% | 238.532,800 | 100% | 238.532,800 | 100% | 238.532,800 | 100% | 238.532,800 | 100% | 238.532,800 | 100% | 238.532,800 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 5 | | | 5 02 01 2.02 07 | Koordinasi dan Penguatan Organisasi Perangkat Daerah | 2 Laporan | 211.027,100 | 2 Laporan | 211.027,100 | 2 Laporan | 211.027,100 | 2 Laporan | 211.027,100 | 2 Laporan | 211.027,100 | 2 Laporan | 211.027,100 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 5 | | | 5 02 01 2.03 | Administrasi Umum | 97 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 5 | | | 5 02 01 2.03 02 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 97 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | 100 Orang | 717.709,532 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 3 | | | 5 02 01 2.05 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 1 | | | 5 02 01 2.05 09 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | 20 Orang | 307.240,000 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 4 | | | 5 02 01 2.06 | Administrasi Umum | 100% | 2.672.902,061 | 100% | 2.672.902,061 | 100% | 2.672.902,061 | 100% | 2.672.902,061 | 100% | 2.672.902,061 | 100% | 2.672.902,061 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 1 | | | 5 02 01 2.06 01 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 30 Jenis | 147.777,000 | 30 Jenis | 147.777,000 | 30 Jenis | 147.777,000 | 30 Jenis | 147.777,000 | 30 Jenis | 147.777,000 | 30 Jenis | 147.777,000 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 2 | | | 5 02 01 2.06 02 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 64 Jenis | 533.426,000 | 64 Jenis | 533.426,000 | 64 Jenis | 533.426,000 | 64 Jenis | 533.426,000 | 64 Jenis | 533.426,000 | 64 Jenis | 533.426,000 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 3 | | | 5 02 01 2.06 04 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 850 Box | 199.320,000 | 850 Box | 199.320,000 | 850 Box | 199.320,000 | 850 Box | 199.320,000 | 850 Box | 199.320,000 | 850 Box | 199.320,000 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 5 | | | 5 02 01 2.06 05 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 13 Item | 87.288,300 | 13 Item | 87.288,300 | 13 Item | 87.288,300 | 13 Item | 87.288,300 | 13 Item | 87.288,300 | 13 Item | 87.288,300 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 4 | | | 5 02 01 2.06 06 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 27 Exemplar | 30.600,000 | 27 Exemplar | 30.600,000 | 27 Exemplar | 30.600,000 | 27 Exemplar | 30.600,000 | 27 Exemplar | 30.600,000 | 27 Exemplar | 30.600,000 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 5 | | | 5 02 01 2.06 09 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 560 Kali | 1.182.157,461 | 560 Kali | 1.182.157,461 | 560 Kali | 1.182.157,461 | 560 Kali | 1.182.157,461 | 560 Kali | 1.182.157,461 | 560 Kali | 1.182.157,461 | BPKAD | Bengkalis | | |
| 6 | | | 5 02 01 2.06 10 | Pengelolaan dan Pengalihan Keuangan SKPD | 1 Kegiatan | 319.799,800 | 1 Kegiatan | 319.799,800 | 1 Kegiatan | 319.799,800 | 1 Kegiatan | 319.799,800 | 1 Kegiatan | 319.799,800 | 1 Kegiatan | 319.799,800 | BPKAD | Bengkalis | | |

| No | Tujuan | Sasaran | Kode Boleking | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Data Capaian Pada Perencanaan | | | | | | Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan | | | | | | Komdit Akhir | Unit Penanggungjawab | Lokasi Kegiatan |
|----|--------|---------|-----------------|--|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|--------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | Tahun 2026 | | | |
| 7 | | | 5 02 01 2.06 11 | Dukung Pelaksanaan Jumlah Media yang dituang dalam 1 Sistem Pemeliharaan Tahun Berbasis Elektronik pada Perangkat Barung Milik Daerah Pemenuhan Urusan Barang dan Jasa Pemerintah Pemertintahan Daerah | Jumlah Media yang dituang dalam 1 tahun | 172.533.500 | 172.533.500 | 172.533.500 | 172.533.500 | 172.533.500 | 172.533.500 | 172.533.500 | 3 Media | 3 Media | 3 Media | 172.533.500 | 3 Media | 172.533.500 | BPKAD | Bengkalis |
| 5 | | | 5 02 01 2.07 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 8.315.412.650 | 8.620.246.074 | 9.200.961.892 | 9.200.961.892 | 10.133.719.031 | 6.316.465.577 | 100% | 100% | 100% | 6.316.465.577 | 100% | 6.316.465.577 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 01 2.07 01 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 4.250.403.000 | 4.463.569.074 | 5.044.264.892 | 5.044.264.892 | 5.977.022.031 | 2.159.768.577 | 2 item | 2 item | 2 item | 2.159.768.577 | 2 item | 2.159.768.577 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 01 2.07 05 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 931.803.650 | 1.023.491.000 | 1.023.491.000 | 1.023.491.000 | 1.023.491.000 | 1.023.491.000 | 200 Unit | 200 Unit | 200 Unit | 1.023.491.000 | 200 Unit | 1.023.491.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | | | 5 02 01 2.07 10 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 3.133.206.000 | 3.133.206.000 | 3.133.206.000 | 3.133.206.000 | 3.133.206.000 | 3.133.206.000 | 35 Unit | 35 Unit | 35 Unit | 3.133.206.000 | 35 Unit | 3.133.206.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 4 | | | 5 02 01 2.08 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 2.810.303.792 | 2.810.303.792 | 2.810.303.792 | 2.810.303.792 | 2.810.303.792 | 2.810.303.792 | 100% | 100% | 100% | 2.810.303.792 | 100% | 2.810.303.792 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 01 2.08 01 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 2.079.000.000 | 101 Orang | 108 Orang | 108 Orang | 2.140.800.000 | 108 Orang | 2.140.800.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 01 2.08 02 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 592.903.792 | 592.903.792 | 592.903.792 | 592.903.792 | 592.903.792 | 592.903.792 | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 3 Kegiatan | 592.903.792 | 3 Kegiatan | 592.903.792 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | | | 5 02 01 2.08 03 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | 20 Orang | 20 Orang | 20 Orang | 100.000.000 | 20 Orang | 100.000.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | | | 5 02 01 2.08 04 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 38.400.000 | 2 Orang | 2 Orang | 2 Orang | 73.643.040 | 2 Orang | 73.643.040 | BPKAD | Bengkalis | |
| 5 | | | 5 02 01 2.09 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 5.661.638.021 | 5.661.638.021 | 5.661.638.021 | 5.661.638.021 | 5.661.638.021 | 5.661.638.021 | 100% | 100% | 100% | 5.661.638.021 | 100% | 5.661.638.021 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 01 2.09 01 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 1.707.731.299 | 1.707.731.299 | 1.707.731.299 | 1.707.731.299 | 1.707.731.299 | 1.707.731.299 | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1.707.731.299 | 1 Dokumen | 1.707.731.299 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 01 2.09 02 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 603.896.722 | 603.896.722 | 603.896.722 | 603.896.722 | 603.896.722 | 603.896.722 | 52 Unit | 52 Unit | 52 Unit | 603.896.722 | 52 Unit | 603.896.722 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | | | 5 02 01 2.09 09 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 332.800.000 | 332.800.000 | 332.800.000 | 332.800.000 | 332.800.000 | 332.800.000 | 20 Orang | 20 Orang | 20 Orang | 384.000.000 | 20 Orang | 384.000.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 4 | | | 5 02 01 2.09 10 | Pengadaan Kendaran Jumlah kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | Persentase pemenuhan pengadaan kendaran dinas/operasional Perorangan Dinas atau yang di sedikan dalam 1 tahun Pemertintahan Daerah | 3.017.210.000 | 3.017.210.000 | 3.017.210.000 | 3.017.210.000 | 3.017.210.000 | 3.017.210.000 | 13 Kegiatan | 13 Kegiatan | 10 Kegiatan | 2.792.166.960 | 10 Kegiatan | 2.792.166.960 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 02 | Menyediakan Optimalisasi Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang Transparan serta Akuntabel | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 321.664.949.315 | 321.664.949.315 | 321.664.949.315 | 321.664.949.315 | 321.664.949.315 | 321.664.949.315 | 100% | 100% | 100% | 321.664.949.315 | 100% | 321.664.949.315 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 02 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 10.550.141.800 | 10.550.141.800 | 10.550.141.800 | 10.550.141.800 | 10.550.141.800 | 10.550.141.800 | 100% | 100% | 100% | 10.550.141.800 | 100% | 10.550.141.800 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 02 2.01 01 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 473.350.000 | 473.350.000 | 473.350.000 | 473.350.000 | 473.350.000 | 473.350.000 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 473.350.000 | 2 Dokumen | 473.350.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 02 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 524.970.000 | 524.970.000 | 524.970.000 | 524.970.000 | 524.970.000 | 524.970.000 | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 524.970.000 | 2 Dokumen | 524.970.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | | | 5 02 02 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 723.580.000 | 723.580.000 | 723.580.000 | 723.580.000 | 723.580.000 | 723.580.000 | 47 SKPD | 47 SKPD | 47 SKPD | 723.580.000 | 47 SKPD | 723.580.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 4 | | | 5 02 02 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 346.960.000 | 346.960.000 | 346.960.000 | 346.960.000 | 346.960.000 | 346.960.000 | 47 SKPD | 47 SKPD | 47 SKPD | 346.960.000 | 47 SKPD | 346.960.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 5 | | | 5 02 02 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 500.280.000 | 500.280.000 | 500.280.000 | 500.280.000 | 500.280.000 | 500.280.000 | 47 SKPD | 47 SKPD | 47 SKPD | 500.280.000 | 47 SKPD | 500.280.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 6 | | | 5 02 02 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah | Persentase Realisasi Anggaran APBD | 397.350.000 | 397.350.000 | 397.350.000 | 397.350.000 | 397.350.000 | 397.350.000 | 47 SKPD | 47 SKPD | 47 SKPD | 397.350.000 | 47 SKPD | 397.350.000 | BPKAD | Bengkalis | |

| No | Tujuan | Sumber | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target Kinerja Program dan Rangka Pendanaan | | | | | | | | | | | | Kondisi Akhir | Unit Penanggungjawab | Lokasi Kegiatan |
|----|---|--------|-----------------|---|---|---|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | Tahun 2022 | | Tahun 2023 | | Tahun 2024 | | Tahun 2025 | | Tahun 2026 | | | | |
| | | | | | | 180 Orang | 2.000.000.000,00 | 180 Orang | 2.000.000.000,00 | 200 Orang | 2.250.000.000,00 | 200 Orang | 2.250.000.000,00 | 200 Orang | 2.500.000.000,00 | 220 Orang | 3.000.000.000,00 | | | |
| 10 | | | 5 02 02 2.02 11 | Pembinaan Peningkatan Jumlah Aparatur yang memahami penastambahan keuangan daerah dan Penertintah Keumahaan/Ges | Jumlah Aparatur yang memahami penastambahan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun | 180 Orang | 2.000.000.000,00 | 180 Orang | 2.000.000.000,00 | 200 Orang | 2.250.000.000,00 | 200 Orang | 2.250.000.000,00 | 200 Orang | 2.500.000.000,00 | 220 Orang | 3.000.000.000,00 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | Meningkatnya Kualitas Laporan Pemerintah Daerah | | 5 02 02 2.03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini Audit Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 7.851.192.300 | 100% | 11.616.232.700 | 100% | 11.616.232.700 | 100% | 11.616.232.700 | 100% | 11.616.232.700 | 100% | 11.616.232.700 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 02 2.03 01 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 3.913.397.200 | 100% | 880.428.700 | 100% | 880.428.700 | 100% | 880.428.700 | 100% | 880.428.700 | 100% | 880.428.700 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 02 2.03 02 | Rekomendasi dan Verifikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Rekomendasi dan Verifikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 779.522.700 | 100% | 400.410.500 | 100% | 400.410.500 | 100% | 400.410.500 | 100% | 400.410.500 | 100% | 400.410.500 | BPKAD | Bengkalis | |
| 3 | | | 5 02 02 2.03 03 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 425.500.000 | 100% | 561.596.700 | 100% | 561.596.700 | 100% | 561.596.700 | 100% | 561.596.700 | 100% | 561.596.700 | BPKAD | Bengkalis | |
| 4 | | | 5 02 02 2.03 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 650.000.000 | 100% | 1.776.794.900 | 100% | 1.776.794.900 | 100% | 1.776.794.900 | 100% | 1.776.794.900 | 100% | 1.776.794.900 | BPKAD | Bengkalis | |
| 5 | | | 5 02 02 2.03 05 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 264.639.500 | 100% | 4.034.397.500 | 100% | 4.034.397.500 | 100% | 4.034.397.500 | 100% | 4.034.397.500 | 100% | 4.034.397.500 | BPKAD | Bengkalis | |
| 6 | | | 5 02 02 2.03 07 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 237.691.000 | 100% | 979.563.600 | 100% | 979.563.600 | 100% | 979.563.600 | 100% | 979.563.600 | 100% | 979.563.600 | BPKAD | Bengkalis | |
| 7 | | | 5 02 02 2.03 09 | Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Penyusunan Kebijakan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 355.377.900 | 100% | 437.691.600 | 100% | 437.691.600 | 100% | 437.691.600 | 100% | 437.691.600 | 100% | 437.691.600 | BPKAD | Bengkalis | |
| 8 | | | 5 02 02 2.03 11 | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 799.564.000 | 100% | 965.830.000 | 100% | 965.830.000 | 100% | 965.830.000 | 100% | 965.830.000 | 100% | 965.830.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 9 | | | 5 02 02 2.03 12 | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 425.500.000 | 100% | 473.923.400 | 100% | 473.923.400 | 100% | 473.923.400 | 100% | 473.923.400 | 100% | 473.923.400 | BPKAD | Bengkalis | |
| 10 | | | 5 02 02 2.03 XX | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 425.500.000 | 100% | 425.500.000 | 100% | 425.500.000 | 100% | 425.500.000 | 100% | 425.500.000 | 100% | 425.500.000 | BPKAD | Bengkalis | |
| 11 | | | 5 02 02 2.03 XX | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 264.639.500 | 100% | 264.639.500 | 100% | 264.639.500 | 100% | 264.639.500 | 100% | 264.639.500 | 100% | 264.639.500 | BPKAD | Bengkalis | |
| 12 | | | 5 02 02 2.03 XX | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 415.456.300 | 100% | 415.456.300 | 100% | 415.456.300 | 100% | 415.456.300 | 100% | 415.456.300 | 100% | 415.456.300 | BPKAD | Bengkalis | |
| 4 | | | 5 02 02 2.04 | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 293.863.615.215 | 100% | 294.026.402.778 | 100% | 296.277.200.171 | 100% | 301.754.779.427 | 100% | 306.315.819.071 | 100% | 315.121.969.821 | BPKAD | Bengkalis | |
| 1 | | | 5 02 02 2.04 08 | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Akuntansi dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 272.304.519.866 | 100% | 272.407.307.429 | 100% | 274.502.195.237 | 100% | 275.602.274.085 | 100% | 276.620.663.162 | 100% | 283.857.298.321 | BPKAD | Bengkalis | |
| 2 | | | 5 02 02 2.04 09 | Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Keuangan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | 100% | 21.559.095.549 | 100% | 21.559.095.549 | 100% | 23.715.004.884 | 100% | 26.085.068.372 | 100% | 28.495.185.800 | 100% | 31.564.671.500 | BPKAD | Bengkalis | |

| No | Tajuan | Sasaran | Kode Rekening | Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Program dan Kegiatan | Target Kinerja Program dan Kegiatan Pemasaran | | | | | | | | | | | | Unit Penanggungjawab | Lokasi Kegiatan | | | |
|----|--------|---------|-----------------|--|--|---|-----------|------------------|------------|------------------|-------------|------------------|-----------|------------------|------------|------------------|-------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| | | | | | | Tahun 2021 | | | Tahun 2022 | | | Tahun 2023 | | | Tahun 2024 | | | | | Tahun 2025 | | |
| | | | | | | Target | Realisasi | Realisasi % | Target | Realisasi | Realisasi % | Target | Realisasi | Realisasi % | Target | Realisasi | Realisasi % | | | Target | Realisasi | Realisasi % |
| 3 | | | 5 02 03 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 5.884.114,926.00 | 100% | 5.884.114,926 | 100% | 5.924.923.830 | 100% | 6.031.706.467 | 100% | 6.108.893.759 | 100% | 6.187.165.790 | 100% | 6.384.290.414 | 100% | 6.384.290.414 | BPKAD | Bengkalis |
| 1 | | | 5 02 03 2.01 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 5.884.114,926.00 | 100% | 5.884.114,926 | 100% | 5.924.923.830 | 100% | 6.031.706.467 | 100% | 6.108.893.759 | 100% | 6.187.165.790 | 100% | 6.384.290.414 | 100% | 6.384.290.414 | BPKAD | Bengkalis |
| 1 | | | 5 02 03 2.01 01 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 250.000.000.00 | 100% | 250.000.000.00 | 100% | 250.000.000.00 | 100% | 312.597.600 | 100% | 312.597.600 | 100% | 312.597.600 | 100% | 312.597.600 | 100% | 312.597.600 | BPKAD | Bengkalis |
| 2 | | | 5 02 03 2.01 03 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 400.000.000.00 | 100% | 400.000.000.00 | 100% | 400.000.000.00 | 100% | 434.185.037.00 | 100% | 434.185.037.00 | 100% | 434.185.037.00 | 100% | 434.185.037.00 | 100% | 434.185.037.00 | BPKAD | Bengkalis |
| 3 | | | 5 02 03 2.01 04 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | 100% | 434.736.800.00 | BPKAD | Bengkalis |
| 4 | | | 5 02 03 2.01 05 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 1.186.269.826.00 | 100% | 1.186.269.826.00 | 100% | 1.237.078.730.00 | 100% | 1.237.078.730.00 | 100% | 1.237.078.730.00 | 100% | 1.237.078.730.00 | 100% | 1.237.078.730.00 | 100% | 1.237.078.730.00 | BPKAD | Bengkalis |
| 5 | | | 5 02 03 2.01 06 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | 100% | 348.230.700.00 | BPKAD | Bengkalis |
| 6 | | | 5 02 03 2.01 07 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | 100% | 498.372.000 | BPKAD | Bengkalis |
| 7 | | | 5 02 03 2.01 08 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | 100% | 283.827.000 | BPKAD | Bengkalis |
| 8 | | | 5 02 03 2.01 09 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | 100% | 370.000.000 | BPKAD | Bengkalis |
| 9 | | | 5 02 03 2.01 10 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | 100% | 447.874.000 | BPKAD | Bengkalis |
| 10 | | | 5 02 03 2.01 11 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | 100% | 347.166.600 | BPKAD | Bengkalis |
| 11 | | | 5 02 03 2.01 12 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | 100% | 567.638.000 | BPKAD | Bengkalis |
| 12 | | | 5 02 03 2.01 13 | Program Pengolahan dan Pengalihan Produk Perikanan | Persentase Pemenuhan Asat | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | 100% | 750.000.000 | BPKAD | Bengkalis |
| | | | total | | | 362.853.753.800.00 | 100% | 362.853.753.800 | 100% | 366.883.769.545 | 100% | 371.855.233.121 | 100% | 376.715.115.156 | 100% | 381.541.902.717 | 100% | 388.697.008.884 | 100% | 388.697.008.884 | BPKAD | Bengkalis |

Tabel VI-2 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Program

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan | Program | Indikator Program | Bidang |
|---|--|---------------------------|---|---|---|---|--|
| Meningkatkan kemampuan kemandirian keuangan daerah, optimalisasi pengelolaan aset daerah dan penciptaan iklim investasi yang kondusif | Terwujudnya peningkatan kemandirian daerah dan optimalisasi penataan Aset. | Persentase Petumbuhan PAD | Peningkatan upaya penerimaan PAD | Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Ketepatan waktu Penyusunan APBD Persentase bendahara pengeluaran yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggunggg jawaban | Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan |
| | | | | | | Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Akuntansi dan Pelaporan |
| | | | Pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara baik, efektif dan efisien | Peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan daerah tepat guna | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD | Bidang Aset Bidang Aset |

Tabel VI-3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan berdasarkan permendagri no. 90 tahun 2019

| 5 | | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |
|---|----|----|------|---|--|
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.01 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.02 | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH | |
| 5 | 02 | 01 | 2.03 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH | |
| 5 | 02 | 01 | 2.05 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | |
| 5 | 02 | 01 | 2.06 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | |

| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
|--|----|----|----|------|----|--|--|--|---|
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.07 | | | | | PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.07 | 01 | | | | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.07 | 05 | | | | Pengadaan Meubeler |
| 5 | 02 | 01 | 10 | 2.07 | | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.08 | | | | | PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.08 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 2.08 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| 5 | 02 | 01 | 03 | 2.08 | 03 | | | | Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor |
| 5 | 02 | 01 | 04 | 2.08 | 04 | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.09 | | | | | PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
| 5 | 02 | 01 | 01 | 2.09 | 01 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |
| 5 | 02 | 01 | 02 | 2.09 | 02 | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |
| 5 | 02 | 01 | 09 | 2.09 | 09 | | | | Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |
| 5 | 02 | 01 | 10 | 2.09 | 10 | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 02 | | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| 5 | 02 | 02 | 01 | 2.01 | 01 | | | | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.01 | 02 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |
| 5 | 02 | 02 | 03 | 2.01 | 03 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD |
| 5 | 02 | 02 | 04 | 2.01 | 04 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD |
| 5 | 02 | 02 | 05 | 2.01 | 05 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD |
| 5 | 02 | 02 | 06 | 2.01 | 06 | | | | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD |
| 5 | 02 | 02 | 07 | 2.01 | 07 | | | | Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD |
| 5 | 02 | 02 | 08 | 2.01 | 08 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |
| 5 | 02 | 02 | 09 | 2.01 | 09 | | | | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran |

| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
|--|----|----|----|------|----|---|
| 5 | 02 | 01 | 02 | 01 | 02 | 01 |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.01 | 10 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.01 | 11 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.01 | 12 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.01 | 13 | Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | | KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 04 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 05 | Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinsronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Penegeelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 08 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Utang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 09 | Rekonsiliasi data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.02 | 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.03 | | KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.03 | 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.03 | 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan -LO dan Beban |
| 5 | 02 | 02 | 02 | 2.03 | 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran |

| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | | | | |
|--|----|----|------|----|---|----|----|----|----|
| 5 | 02 | 01 | 02 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindaklanjut Terhadap LHPBPK Atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 07 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintahan Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.03 | 13 | Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 08 | PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | |
| 5 | 02 | 02 | 2.04 | 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 01 | Penyusunan Standar Harga | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 08 | Penilaian Barang Milik Daerah | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah | | | | |

| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | | | |
|--|-----------|-----------|----|----|---|--|
| 5 | 02 | 01 | | | | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 10 | Optimalisasi, Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 11 | Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | |
| 5 | 02 | 03 | 01 | 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | |

BAB VII.

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan keuangan selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama

periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Indikator ini akan menggambarkan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Selengkapnya target-target capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis untuk periode Tahun 2021-2026 yang akan datang disajikan pada tabel 7.1. berikut ini.

Tabel VII-1 Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| No | Indikator | Kondisi Awal (2021) | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Akhir (2026) |
|-----|--|---------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. | Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% |
| 2. | Persentase Pemanfaatan Kekayaan Aset Daerah yang Menunjang Peningkatan PAD | 35% | 40% | 45% | 50% | 55% | 75% | 75% |
| 3. | Ketepatan waktu Penyusunan APBD | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| 4. | Persentase bendahara pengeluaran dan pembantu yang tepat waktu dalam penyampaian pertanggung jawaban | 85% | 86% | 87% | 88% | 89% | 90% | 90% |
| 5. | Penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| 6. | Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| 7. | Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 70 | 70 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 |

Indikator kinerja yang disajikan merupakan alat ukur dalam penilaian capaian yang dikehendaki dari implementasi program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dalam tabel 7.1. tersebut, terdapat Enam indikator sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka pengkajian dan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan.

BAB VIII. PENUTUP

8.1 Kesimpulan

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Bapenda sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

1. Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana bersama dengan Kepala Bappeda, Kepala Bapenda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.

3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan melalui Renja Bapenda setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Bapenda dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bengkalis dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.
7. Dalam Pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

BENGKALIS, SEPTEMBER 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS



AULIA, S.Pi, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19701109 199303 1 005

Lampiran 1

IKU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BPKAD KAB. BENGKALIS 2021-2026

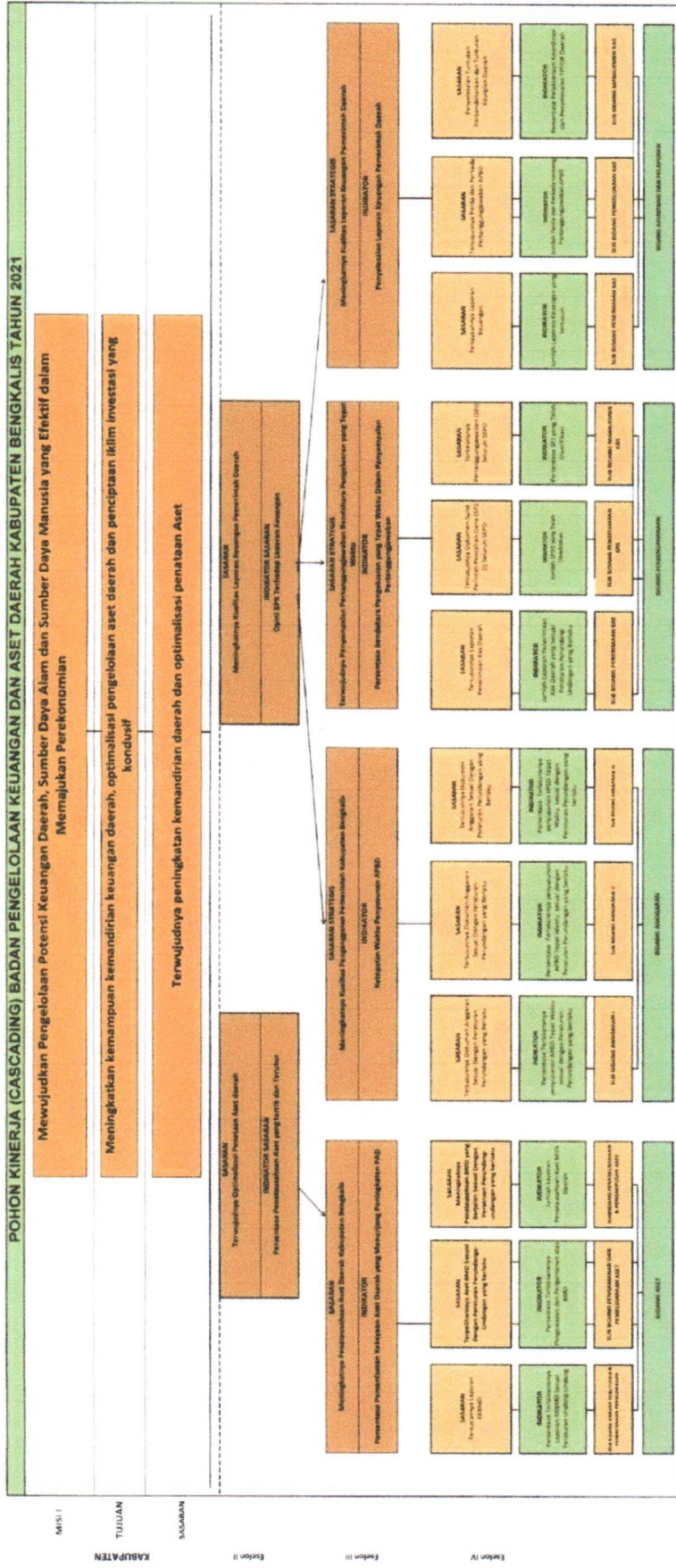
TUGAS : Melaksanakan tugas penunjang Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

- FUNGSI**
1. Menyelenggarakan perumusan kebijakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
 2. Pelaksanaan tugas, fungsi Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
 3. Pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
 4. Pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Bengkalis

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | DEFINISI OPERASIONAL | FORMULASI | KETERANGAN |
|-----|--|---|--|--|-------------------------|
| 1 | Terwujudnya optimalisasi penataan aset daerah | Persentase penatausahaan aset yang tertib dan terukur | Jumlah aset yang telah di tata usaha secara tertib dan terukur | (Jumlah Aset yang tertib dan Terukur / Total Keseluruhan Aset) X 100% | Kepala Bidang Aset |
| 2 | Meningkatnya kualitas keuangan laporan pemerintah daerah | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan | Pernyataan pemeriksa kewajiban keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah Profesional mengenai infomasi disajikan | Penilaian Opini yang Dikeluarkan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan; (Kesesuaian dengan SAP, Kecukupan Pengungkapan sesuai dengan Pengungkapan yang diatur didalam SAP, Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang- undangan dan efektifitas SistemPengendalian Interns) | Kepala Bidang Akuntansi |

Lampiran II

POHON KINERJA (CASCADING) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021



LAMPIRAN III

SWOT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

| Kekuatan (Strengths) | Kelemahan (weakness) |
|---|---|
| Mempunyai SOTK yang sudah jelas; | Kualitas SDM masih belum memadai; Kuantitas dan kualitas masih dirasa perlu untuk lebih ditingkatkan dengan menambah PNS dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang menyangkut pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pemahaman dan implementasinya sesuai dengan yang diharapkan yaitu SDM yang handal. |
| Disiplin dan tanggungjawab sudah baik | Belum terintegrasinya sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sistem Aplikasi SIPKD dan SIMDA BMD masih belum terintegrasi sehingga masih terdapat ketidaksesuaian . |
| Sudah lengkapnya SOP untuk mendukung operasional Organisasi | Belum optimalnya fungsi pengelolaan aset daerah; Fungsi pengelolaan aset daerah dirasakan masih perlu diperkuat dengan pembentukan peraturan daerah atau peraturan Bupati Bengkalis yang mengatur secara rinci dan jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana yang belum memadai. |

| Peluang (Opportunities) | Ancaman/Tantangan (Threats) |
|--|---|
| <p>Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan hal yang krusial, sehingga peraturan perundang-undangannya sangat memadai dan dinamis lengkap dengan peraturan perubahannya.</p> | <p>Koordinasi antar Dinas terkait belum memadai;</p> <p>Masih terdapatnya kendala dalam proses koordinasi dengan dinas terkait, hal ini bisa menjadi hambatan untuk pencapaian indikator ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan khususnya.</p> |
| <p>Adanya komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan dan aset daerah;</p> <p>Peraihan Opini BPK merupakan usaha dan perjuangan bersama seluruh SKPD sebagai perangkat daerah, maka dari itu adanya komitmen bersama adalah sangat esensial dan mendasar.</p> | <p>Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>Kondisi tersebut menjadi kendala dalam mengevaluasi apakah implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau belum.</p> |
| <p>Penggunaan teknologi informasi yang memadai dan modern.</p> <p>Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam manajemen perkantoran modern dalam menjalankan aktivitasnya, seperti mengolah data-data transaksi pengelolaan keuangan dan aset daerah sehingga menjadi informasi yang lebih berguna.</p> | <p>Adanya kekhawatiran dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;</p> <p>Kekhawatiran ini harus dilindungi dengan payung hukum yang mengatur setiap pengelolaan transaksi dalam penatausahaan keuangan daerah sampai kepada proses pelaporannya.</p> |
| | <p>Masih kurangnya pemahaman para aparatur pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan pemerintah daerah;</p> <p>Kondisi tersebut dapat berakibat fatal, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan.</p> |
| | <p>Adanya perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan dan aset yang tidak diprediksi.</p> <p>Hal ini menjadi kendala ketika anggaran sudah ditetapkan dengan peruntukannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada waktu itu, tetapi kemudian harus mengalami perubahan atau penghapusan mata anggaran karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang baru.</p> |